

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar Aziz, *Filsafat Hukum*, (Pekanbaru: Al Mujahadah Press, November 2012).
- A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam, 2004.
- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Ahmad Yani, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Responsif Catatan Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004.
- Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan hukum Nasional*, Armico, Bandung, 1987.
- Dept. Hukum dan HAM, *Jurnal legislasi indonesia vol. 9 no. 4-desember 2012*
- Departemen Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan United Nations Development Programme, *Buku Panduan Praktis Memahami Perancangan Perda*, cetakan kesatu, Mei 2008.
- H. Bomer Pasaribu, *Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen Dari Perspektif Legislasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Majalah Hukum Nasional (1), 2007.

Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, November 2012).

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, Oktober 2006).

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan (Buku 1), edisi revisi*, (Jakarta: Penerbit Kanisius, 2007).

Nugroho Wahyu, *Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 10 No. 3.

Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010).

Solly Lubis, *Politik Hukum Dan Kebijakan Publik*, (Bandung: Mandar Maju, 2014).

Sri Sumantri, *Hak Uji Materil di Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 1977.

Sajipto Raharjo, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 10 No. 03 - September 2013* : 209 –218.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman

Keputusan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2004 tentang Kedudukan Tugas Fungsi
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dilingkungan
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi,
Administrasi Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan
Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah
Agung

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH.OT.01.01 Tahun 2009
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor:
M.09-PR.07.10 tahun 2007 tentang Organisasi dan tata Kerja
Departemen Hukum dan HAM RI

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
M.03-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Laporan Pelaksanaan Tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Riau Tahun Anggaran 2013, (Pekanbaru : Kanwil Kemenkumham Riau
: 2015)

Laporan Pelaksanaan Tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Riau Tahun Anggaran 2014, (Pekanbaru : Kanwil Kemenkumham Riau
: 2015)

Rekapitulasi Data yang dikeluarkan oleh Biro Hukum Depdagri Tahun 2006 dan
Tahun 2013.

ANTARA News, Senin 3 Januari 2011, Pekanbaru

<http://www.djpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/1156-menakar-korelatifitas-antara-harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-hak-uji-materiil-mahkamah-agung.html>, diakses tanggal 01-03-2015

<http://jdih.riau.go.id/index.php/informasi-/103-pns-biro-hukum-pakta-integritas>,
Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Riau, 26-04-2014

http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Indonesia, 26-04-2014 Wikipedia, Kementerian Hukum dan HAM,